PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas BerkatNya dan RahmatNya sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2025 masih berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2025, namun mulai menyesuaikan dengan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Nunukan yang baru yakni **"Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri".**

Dokumen Perubahan Renja ini sangat berarti dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja, dimana, dokumen ini menjelaskan tentang besarnya terget yang akan dicapai serta menggambarkan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025 setelah evaluasi triwulan pertama.

Dengan demikian, dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 ini, akan dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan bahan acuan pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksankan oleh masing-masing bidang/bagian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Akhirnya semoga dokumen perubahan renja tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Nunukan, April 2025
KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S. Sos., M. Si
NIP. 19700810 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistimatika Penulisan 7

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3 Penyesuaian Kinerja Urusan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 21

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 24

BAB IV
PENUTUP 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah didasari oleh amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara substansi pada Undang-undang tersebut mengamanatkan penyusunan perubahan Rencana Kerja sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaiman yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja atau disebut Perubahan Renja merupakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan pada pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Jadi alasan dasar Penyusunan perubahan renja berdasarkan peraturan tersebut di atas dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada Renja samapi dengan Triwulan I pada tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidak

sesuaian dengan perkembangan keadaan dan situasi terhadap perubahan arah kebijakan penganggaran pada pemerintah daerah pada umumnya dan khususnya pada SKPD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat yang belum terfasilitasi dalam Renja murni Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025. Dokumen perubahan Renja ini, merupakan dokumen perubahan perencanaan Tahun 2025 yang disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakn program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan menyesuaikan kondisi terkini dan untuk mengakomodir kebutuhan yang belum terselesaikan di tahun 2024, dan selanjutnya dokumen perubahan Renja ini akan menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025 dalam rangka penyelesaian kinerja tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunuka tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Perturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Perturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
12. Permenpan dan RB. Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Repbublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dan menjabarkan perubahan perencanaan Tahun Anggaran 2025 sebagai panduan dalam menyusun dan merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dengan kondisi terkini dalam proses penyelesaian kegiatan;

2. Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025;
3. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan potensi yang dimiliki;
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Pasal 361 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah bahwa sistematika penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalh sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja selain merupakan wujud pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Nunukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Capaian target sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumusan Indikator	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja TW 1 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Minimnya pelanggaran K3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Jumlah Pengaduan dan pelanggaran teridentifikasi yang diselesaikan / Jumlah pengaduan dan pelanggaran teridentifikasi yang masuk x 100 %	100%	10%
2.			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada / Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkada x 100%	100%	-

Berdasarkan tabel di atas bahwa capaian indikator sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai 10%. Hal ini terjadi karena pada Triwulan I Tahun 2025 adanya efisiensi anggaran tahun 2025, sehingga penanganan kasus yang ditarget 125 kasus hanya mampu ditangani sebanyak 48 kasus. Untuk lebih jelasnya evaluasi hasil pelaksanaan renja sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut :

TABEL
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025 (kumulatif Triwulan I)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Catatan Penting
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*(10)= 8/6 *100*	*(11)= 9/7*100*	*12*
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**90,608,360,669.00**		**14,636,562,164.00**		**3,522,479,023.00**		**24.07**	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**500 persen**	**71,240,778,789.00**	**100 Persen**	**12,331,217,924.00**	**28,57 Persen**	**3,396,059,023.00**	**28.57**	**27.54**	

1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**50 Dokumen**	**276,089,492**	**10 Dokumen**	**78,791,500**	**8 Dokumen**	**21,520,000**	**80**	**27.31**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	61,537,439	1 Dokumen	33,852,500	0	21,520,000	0	63.57	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45 Dokumen	214,552,053	9 Dokumen	44,939,000	8 Dokumen	-	88.89	-	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**70 Bulan**	**49,189,319,578.00**	**14 Bulan**	**8,399,195,686.00**	**4 Bulan**	**2,439,122,317**	**57.14**	**29.04**	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	49,070,630,043	79 Orang/Bulan	8,346,442,711	70 Orang/Bulan	2,439,122,317	88.61	29.22	
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	43,845,791	150 Dokumen	35,630,975	16 Dokumen	-	10.67	-	Realisasi anggaran sudah melebihi 100% karena Anggaran yang diperoleh tahun ini melebihi dari Pagu Renja
5.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 Dokumen	44,253,658	7 Dokumen	10,974,000	0	-	0.00	-	

6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30,590,086	3 Laporan	Rp 6,148,000	0	-	0.00	-	
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian**	**25 Unit**	**782,299,926**	**5 Unit**	**240,940,330**	**0**	**-**	**0**	**-**	
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	548,243,100	1 Paket	202,290,000	0	-	0	-	Realisasi anggaran sudah melebihi 100% karena Anggaran yang diperoleh tahun ini melebihi dari Pagu Renja untuk penambahan atribut sebagai pemenuhan sarana minimal (pendukung SPM)
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	169,358,721	2 Orang	Rp 25,524,000	0	-	0	-	
9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	64,698,105	20 Orang	Rp 13,126,330	0	-	0	-	

4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**25 Unit**	**1,312,861,381**	**5 Unit**	**222,931,670**	**0**	**-**	**0**	**-**	
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	28,903,330	1 Paket	5,643,880	0	-	0	-	
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	177,805,140	4 Paket	29,583,500	0	-	0	-	
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	227,454,875	4 Paket	36,186,290	0	-	0	-	
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	90,352,751	3 Paket	-	0	-	0	#DIV/0!	
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137 Laporan	788,345,285	30 Laporan	151,518,000	2 Laporan	-	6.67	-	
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**6 Unit**	**234,000,000**	**2 Unit**	**49,950,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	

15.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	234,000,000	2 Unit	49,950,000	0	-	0	-	
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60 Laporan**	**18,471,032,687**	**12 Laporan**	**3,150,333,608**	**3 Laporan**	**935,416,706**	**25**	**29.69**	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	572,490,590	12 Laporan	92,886,000	3 Laporan	19,388,706	25	20.87	
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	17,898,542,097	12 Laporan	3,057,447,608	3 Laporan	916,028,000	25	29.96	
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**	**78 Unit**	**975,175,725**	**16 Unit**	**189,075,130**	**0**	**-**	**0**	**-**	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	732,873,603	9 Unit	117,422,110	0	-	0	-	
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	51,075,102	5 Unit	8,950,000	0	-	0	-	

20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	191,227,020	2 Unit	62,703,020	0	-	0	-	
II.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**500 Persen**	**19,367,581,880.00**	**100 Persen**	**2,305,344,240.00**	**8 Persen**	**126,420,000.00**	**8.00**	**5.48**	
8	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**2500 Kasus**	**17,545,048,423.00**	**500 Kasus**	**1,976,217,470.00**	**40 Kasus**	**126,420,000.00**	**8.00**	**6.40**	
21.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1,803,064,973	2 Dokumen	325,133,500	0	-	0	-	
22.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1200 Dokumen	796,958,776	240 Dokumen	159,272,500	0	-	0	-	

23.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5117 Orang	1,965,822,417	25 Orang	183,166,200	0	-	0	-	
24.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	70 Dokumen	5,533,581,812	18 Dokumen	112,322,700	0	-	0	-	
25.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2500 Kasus	6,918,174,025	500 Laporan	1,103,208,570.00	40 Laporan	126,420,000.00	0	11.46	
26.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	15 Kasus	212,600,762	3 Laporan	47,980,500	0	-	0	-	

27.	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	20 Laproran	314,845,658	4 Laproran	45,133,500	0	-	0	-	
9.	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**	**8 Perda/Perkada**	**1,331,164,193**	**8 Perda/Perkada**	**243,625,770**	**0**	**-**	**0.00**	**-**	
28.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	19 Laporan	323,607,920	5 Laporan	58,494,800	0	-	0.00	-	
29.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	250 Laporan	473,110,897	50 Laporan	84,420,000	0	-	0.00	-	
30.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	240 Laporan	534,445,376	60 Laporan	100,710,970	0	-	0.00	-	
10.	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**10 Orang**	**491,369,264**	**2 Orang**	**85,501,000**	**0**	**-**	**0.00**	**-**	

31	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	10 Laporan	491,369,264	2 Laporan	85,501,000	0	-	0.00	-	
	Jumlah			**90,608,360,669.00**		**14,636,562,164.00**		**3,522,479,023.00**		**24.07**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 relatif tidak menemukan adanya kendala yang berarti, namun karena adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berdasarkan sasaran target renstra dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingakt capaian kinerja. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Relasiasi 2024 dan Proyeksi 2025 menggunakan persentase target realisasi program
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten.	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Relasiasi 2024 dan Proyeksi 2025 menggunakan persentase target realisasi Kegiatan

2.3. Penyesuaian Kinerja Urusan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bahwa pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025, masih berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Namun Pada tahun 2025 ini merupakan tahun transisi dari Renstra sebelumnya ke Renstra yang baru, maka diperlukan penyesuaian kinerja dengan Renstra periode baru yakni Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunkan pada tahun 2021-2025 sedikit mengalami perubahan ke Renstra Tahun 2025-2029, namun secara substansinya masih mempunyai makna dan tujuan yang sama Cuma narasinya saja yang berbeda karena harus berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Secara lebih jelas rancangan penyesuaian kinerja urusan bidang penyelenggaraan pemerintah daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut :

PENYESUAIAN KINERJA URUSAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Bidang Urusan : Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

KINERJA RENSTRA PERIODE LAMA						KINERJA RENSTRA PERIODE BARU					
TUJUAN PD			SASARAN PD			Draf TUJUAN PD			Draf SASARAN PD		
(RENSTRA 2021-2026)			(RENSTRA 2021-2026)			(RENSTRA 2025-2029)			(RENSTRA 2025-2029)		
Narasi	Indikator (Satuan)	Target (2025)	Narasi	Indikator (Satuan)	Target (2025)	Narasi	Indikator (Satuan)	Target (2025)	Narasi	Indikator (Satuan)	Target (2025)
Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan K3	Persentase Pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan (%)	100	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran Ketenteraman dan ketertiban masyarakat (%)	100	Meningkatnya Rasa Aman dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	76	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan (%)	100

				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten (%)	100					Presentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	100
									Meningkatnya Sinergitas Masyarakat yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Presentase Organisasi Trantibumlinmas Yang Aktif (%)	17.08
									Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat Sakip yang diperoleh	BB

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan situasi terhadap perubahan arah kebijakan pengangaaran serta mempertimbangkan kondisi realisasi pendapatan tahun 2025 pada pemerintah Kabupaten Nunukan, sangat diperlukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025. Rencana kerja dan pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merencanakan perubahan yang berfokus pada pengurangan anggaran karena adanya efisiensi anggaran sehingga perlu penyesuaian. Untuk rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan masih sama dengan rencana kerja murni tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiata, 30 (tiga puluh) sub kegiatan namun target indikator kinerja menyesuaikan dengan kondisi. Prioritas Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2025.

Secara spesifik review rancangan perubahan RKPD dan hasil kebutuhan yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan sudah sesuai dengan rancangan perubahan RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan, hal ini dikarenakan adanya tambahan tenaga CPNS 2 Orang dan PPPK sebanyak 15 Orang dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam rangka menyikapi hal tersebut di atas, maka perubahan anggaran tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi program strategis pemerintah Kabupaten Nunukan guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Nunukan yakni terkait pemenuhan alokasi gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), pemenuhan honorarium tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN), pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi serta hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan prioritas yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Secara lebih jelas rancangan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2025			PAGU (Rp) TAHUN 2025			KETERANGAN
				Renja	DPA	Perubahan Renja	Renja	DPA	Perubahan Renja	
sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum		sesudah	sebelum		sesudah	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14,636,562,164.00	17,610,541,816	15,722,489,224	(1,888,052,592)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	12,331,217,924.00	15,168,507,906	14,037,648,689	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	19 Dokumen	78,791,500	177,157,510	110,022,840	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	33,852,500	49,530,500	49,530,500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	44,939,000	127,627,010	60,492,340	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**14 Bulan**	**14 Bulan**	**12 Bulan**	**8,399,195,686.00**	**10,378,594,542**	**9,475,280,951**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	79 Orang/Bulan	87 Orang/Bulan	8,346,442,711.00	10,269,993,602	9,406,799,521	Pengurangan Gaji dan TPP CPNS 7 Bulan & CP3K 3 Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	35,630,975	37,018,940	32,407,430	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	10,974,000	48,354,000	24,330,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	6,148,000	23,228,000	11,744,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**5 Unit**	**3 Dokumen**	**240,940,330**	**43,490,330**	**23,553,710**	

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0	202,290,000	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	25,524,000	30,364,000	16,816,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	13,126,330	13,126,330	6,737,710	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**5 Unit**	**5 Unit**	**4 Dokumen**	**222,931,670**	**231,002,760**	**138,425,830**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,643,880	6,290,680	6,290,680	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	29,583,500	35,285,670	27,057,670	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7 Paket	36,186,290	37,908,410	24,635,480	ada Penambahan target, pengalihan dari belanja barang cetak dan penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0	-	-	-	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan digabung dengan Bahan Logistik Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	12 Laporan	151,518,000	151,518,000	80,442,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**2 Unit**	**2 Unit**	**2 Unit**	**49,950,000**	**99,900,000**	**99,900,000**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	49,950,000	99,900,000	99,900,000	Mengakomodir Usulan dari Kecamatan dan Kendaraan Patwal
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**2 Dokumen**	**3,150,333,608**	**4,048,574,884**	**4,048,574,884**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	92,886,000	81,900,000	81,900,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3,057,447,608	3,966,674,884	3,966,674,884	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**	**16 Unit**	**16 Unit**	**26 Unit**	**189,075,130**	**189,787,880**	**141,890,474**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	14 Unit	117,422,110	118,134,860	89,048,360	Jumlah unit kendaraan bertambah & dan kondisi kendaraan yg butuh pergantian suku cadang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8,950,000	8,950,000	8,950,000	Jumlah unit dan jumlah pemeliharaan bertambah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	62,703,020	62,703,020	43,892,114	Lanjutan pemeliharaan gedung kantor dan menambah unit
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**Persentase penurunan gangguan trantibum**	**100%**	**100%**	**5%**	**2,305,344,240.00**	**2,442,033,910**	**1,684,840,535**	

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani** **2. Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan dikukuhkan**	**500 Kasus**	**500 Kasus**	**482 Kasus** **150 Orang**	**1,976,217,470.00**	**1,863,633,630**	**1,419,925,605**	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	325,133,500	288,653,500	84,069,000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	240 Dokumen	240 Dokumen	150 Dokumen	159,272,500	126,080,250	87,415,750	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	25 Orang	25 Orang	183,166,200	239,308,200	172,381,200	

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	18 Dokumen	18 Dokumen	9 Dokumen	112,322,700	77,039,750	14,489,750	Penambahan pembinaan Satlinmas di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam rangka Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bidang Trantibum dan Kodim selaku pembina Satlinmas
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	500 Laporan	500 Laporan	12 Laporan	1,103,208,570.00	1,040,172,180.00	1,006,446,155.00	
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	47,980,500	47,246,250	25,556,250	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 Laproran	4 Laproran	4 Laproran	45,133,500	45,133,500	29,567,500	

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**	**8 Perda/Perkada**	**8 Perda/Perkada**	**25 Perda/Perkada**	**243,625,770**	**448,026,280**	**179,810,930**	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	58,494,800	66,215,300	35,724,380	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	50 Laporan	50 Laporan	12 Laporan	84,420,000	233,166,400	72,462,200	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60 Laporan	60 Laporan	12 Laporan	100,710,970	148,644,580	71,624,350	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**2 Orang**	**2 Orang**	**6 Orang**	**85,501,000**	**130,374,000**	**85,104,000**	

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	85,501,000	130,374,000	85,104,000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang disusun berdasarkan perubahan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan Renja Satpol PP Kabupaten Nunukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada perubahan Renja ini masih sama dengan rencana kerja murni tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiata, 30 (tiga puluh) sub kegiatan, namun target indikator kinerja menyesuaikan dengan kondisi.

Dokumen perubahan Renja Satpol PP Tahun 2025 ini, akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025. Dengan demikian semoga dokumen ini diharapkan dapat menjawab tantangan kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan dan dapat menjadi acuan dan pengarah dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini.

Nunukan, April 2025
KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S. Sos., M. Si
NIP. 19700810 199803 1 008